



▶ APARATUR PEMERINTAH

SE WFH Atur Kebijakan dan Penghematan

DANUREJAN—Pemda DIY menerbitkan Surat Edaran (SE) No. B/000.8.6.1/5/B.6/2026 tentang Pelaksanaan Kebijakan Transformasi Budaya Kerja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda DIY.

Luqas Subarkah & Stefani Yulindriani
redaksi@harianjogja.com

Dalam SE tersebut WFH dilaksanakan setiap Rabu dengan pengecualian unsur pimpinan jabatan struktural; unit layanan kedaruratan dan keamanan seperti Bidang Penanganan Darurat dan Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta beberapa bidang di Satpol PP; unit layanan kesehatan; unit layanan pendidikan meliputi semua sekolah; unit layanan administrasi dan pendapatan seperti bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta unit layanan lapangan seperti Balai Pengelolaan Sampah dan

- ▶ Poin penting lainnya dalam SE ini adalah penghematan di setiap OPD, meliputi BBM, listrik, air dan telepon.
- ▶ Di Pemkot Jogja, jumlah ASN yang menjalani WFH pada Jumat (10/4) hanya 201 orang atau 2,8%.

layanan publik lainnya. "Pelaksanaan WFH diatur oleh kepala organisasi perangkat daerah [OPD] minimal 50 persen dari jumlah pegawai ASN," ujar Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, Senin (13/4).

Poin penting lainnya dalam SE ini adalah penghematan di setiap OPD, yakni dengan mengurangi penggunaan BBM, listrik, air dan telepon. "OPD diminta membatasi perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50 persen dan luar negeri sebesar 70 persen. OPD juga perlu mengurangi frekuensi serta jumlah rombongan dalam perjalanan dinas," katanya. Penggunaan kendaraan dinas juga dikurangi maksimal 50%.

"Hasil penghematan digunakan untuk membiayai program prioritas pemerintah daerah, khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik

dan optimalisasi belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat," katanya.

Untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik, kepala OPD diwajibkan melaporkan rencana aksi, hasil penghematan dan pelaksanaan WFH pada setiap akhir bulan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)-DIY dengan tembusan Kepala Biro Organisasi Setda DIY.

Hanya 2%

Di lingkungan Pemkot, jumlah ASN yang menjalani WFH pada Jumat (10/4) tak banyak. Meski demikian, Pemkot tetap akan melakukan evaluasi pada akhir bulan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja, Sarwanto, menuturkan jajarannya mencatat

hanya ada 201 orang atau 2,8% dari total ASN di Pemkot Jogja yang menjalani WFH, sementara lainnya sebanyak 6.914 orang tetap bekerja di kantor.

Kebijakan WFH hanya diterapkan di OPD yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Dari 50 OPD di Pemkot Jogja, baru 11 OPD yang menerapkan skema tersebut. "OPD yang sifatnya pelayanan sebagian besar tetap bekerja di kantor. Yang WFH misalnya ASN di bagian administrasi pembangunan, inspektorat, dan sebagian kecil di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujarnya, Senin.

Menurut Sarwanto, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan WFH belum dapat dilakukan lantaran baru satu kali diterapkan. Salah satu tujuan penerapan WFH untuk efisiensi anggaran, terutama untuk penghematan BBM kendaraan dinas dan penggunaan listrik di lingkungan Pemkot Jogja. "Dampaknya baru bisa dilihat di akhir bulan dari tagihan," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man			

Yogyakarta, 18 April 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005